



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
UNIT KERJA : RSUD MUNTILAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI ROCHMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **794851**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.550.000.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, LAINNYA Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 740 m2/80 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, LAINNYA Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 838 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 59 m2/48 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, LAINNYA Rp. 350.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, LAINNYA Rp. 750.000.000
7. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, LAINNYA Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 244.000.000

1. MOTOR, KYMCO SD25AJ Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, PIAGIO VESPA LX 150 IE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



4. MOBIL, HONDA BRIO 08102T YE AT CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. MOTOR, HONDA ACF1L21B06 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
6. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 2.02 WD M /T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. MOTOR, KYMCO SG 20 SA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	47.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	163.835.537
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	873.609.618
F. HARTA LAINNYA	Rp.	20.000.000
Sub Total	Rp.	6.898.445.155
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.898.445.155

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.